

SKRIPSI
IMPLEMENTASI FUNGSI DAN PERANAN KPK DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI
TANGKAP TANGAN



Oleh :

BRANDO J LENGKONG

NIM : 15251062
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PEMINATAN : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**IMPLEMENTASI FUNGSI DAN PERANAN KPK DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
OPERASI TANGKAP TANGAN**

Nama : Brando Jeremia Lengkong
NIM : 15251062
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

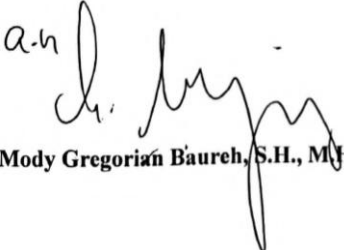
**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Januari 2020**

Manado, 27 Januari 2020

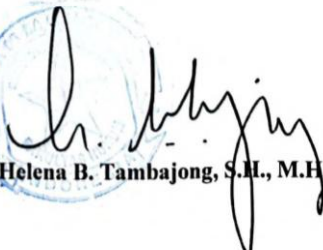
**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

a-h

Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum.

Dekan,


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI FUNGSI DAN PERANAN KPK DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
OPERASI TANGKAP TANGAN**

Diajukan oleh:

**BRANDO JEREMIA LENGKONG
15251062**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 27 Januari 2020**

Dosen Pembimbing I



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

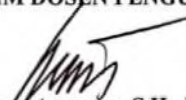
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI


IMPLEMENTASI FUNGSI DAN PERANAN KPK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN

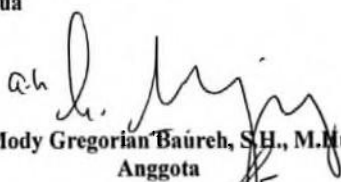
Nama : Brando Jeremia Lengkong
NIM : 15251062
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

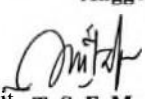
Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Januari 2020

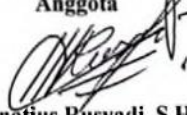
TIM DOSEN PENGUJI


Primus Aryesam, S.H., M.H.
Ketua


James V. L. Pontoh, S.H., M.H.
Anggota

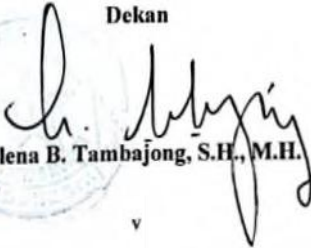

Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum
Anggota


Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota


Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado: 27 Januari 2020


Brandó Jeremfa Lengkong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan, penyertaan, dan kasih-Nya yang tak berkesudahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI FUNGSI DAN PERANAN KPK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN” dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan jika tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

5. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing 1 yang sudah membimbing penulis dalam penulisan usulan penelitian hukum hingga selesai;
6. James V. L Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang sudah membimbing penulis dalam penulisan usulan penelitian hukum hingga selesai;
7. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Mama dan Papa, Kaka, Adik dan seluruh keluarga besar dari penulis;
9. Teman-teman kampus yang selalu membantu dan mendukung Icad, Glory, Novlita, Olivia, Raymond, Brillian, Rayn, Goenawan, Calvin dan teman-teman angkatan 2015 serta teman-teman lain yang belum sempat disebutkan;
10. Teman-teman dari CMB Squad, Janto, Alan, Mamet, Wokas, Arya, Epe, Fano, Arel, Ryko, Timo, Acel, Hap, Ap, David, Naftali serta teman-teman lain yang belum disebutkan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, baik saran maupun kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat khusus bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Manado, 24 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Brando J. Lengkong, 2020. **IPLEMENTASI FUNGSI DAN PERANAN KPK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN**. Dibimbing oleh Primus Aryesam, S.H., M.H dan James V. L. Pontoh, S.H., M.H

i

t

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK merupakan lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta bahwa saat ini fungsi utama KPK dalam upaya penegakan korupsi belum dilaksanakan dengan baik, karena beberapa faktor internal maupun external yang menghambat kinerja KPK sehingga fungsi pencegahan dan penindakan oleh KPK menjadi tidak optimal. KPK sendiri mempunyai salah satu upaya pencegahan korupsi yang mereka sebut sebagai Operasi Tangkap Tangan atau OTT, namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan polemik di masyarakat. Permasalahan dari tulisan ini adalah fungsi KPK dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan peran KPK dalam melakukan OTT berdasarkan ketentuan undang-undang. Penulisan ini bertujuan mengetahui fungsi dan peran KPK dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan OTT oleh KPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai pelaksanaan OTT, KPK menggunakan teknik penyadapan yang sah sebagai alat bukti menurut KUHAP. Kiranya upaya koordinasi dan supervisi antara lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan dan Kepolisian dapat ditingkatkan sehingga upaya penegakan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

: , ,

Kata Kunci : Korupsi, KPK, OTT


ABSTRACT

Brando J. Lengkong, 2020. **THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS AND ROLES OF KPK IN COPING WITH CORRUPTION CASES THROUGH IN-THE-ACT ARREST OPERATIONS.** Supervised by Primus Aryesam, S.H., M.H and James V. L. Pontoh, S.H., M.H

The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK) is a State Institution established to increase the effectiveness to eradicate corruption cases. The fact shows that currently, the commission has not performed optimally due to internal and external factors that hinder their performance. KPK itself has one of the efforts to prevent corruption which they call in-the-act arrest operation or OTT. In its implementation, it often creates polemics in society. This research aimed to determine the functions and roles of the KPK in their efforts to prevent and prosecute corruption crimes and the implementation of in-the-act arrest operations (OTT) by the KPK. This research used the normative juridical method through a statutory approach. The result of this research indicated that the regulation regarding the prevention and prosecution of corruption is regulated in Article 1 paragraph 3 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Regarding the implementation of OTT, the KPK uses legal wiretapping techniques as evidence according to the Criminal Procedure Code. We hope that coordination and supervision efforts between law enforcement agencies, the Attorney General's Office and the Police Department, can be improved so that efforts to eradicate corruption in Indonesia can run well.

Keywords: Corruption, KPK, OTT

This translation has been checked and proven accurate.



Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd
Head of Language Development Office
Universitas Katolik De La Salle Manado

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A: Latar Belakang	1
B: Rumusan Masalah	7
C: Tujuan Penelitian	7
D: Manfaat Penelitian	8
E: Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A: Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	10
B: Pengertian Tindak Pidana	13
C: Pengertian Korupsi.....	14
D: Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16

E. Pengertian Operasi Tangkap Tangan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sumber Data	21
C. Metode Pengumpulan Data	25
D. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Implementasi Konsep Pencegahan dan Penindakan Terhadap PelakuTindak Pidana Korupsi oleh KPK	26
B. Fungsi dan Peranan KPK dalam Melakukan OTT berdasarkan pada Ketentuan Undang-Undang yang berlaku	34
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47

